

Kajian Pengembangan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen

Dwiyanto Indiahono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Korespondensi: Jl. Prof. DR. H. Bunyamin 993, Purwokerto. Email: indiahono@yahoo.com

Abstract: Public need accurate information concerning problem, education performance indicator and performance indicator that matching with future and public demand. Local government have to can shows the ability and willingness to compile performance indicator of education local-department. Indicator Performance of education local-department have to depict commitment seriously of local government in educating local people. Therefore, this research formulate research question: How improving performance indicator of education local-department at Kebumen Regency that matching with future and public demand? Research with qualitative method have been done. The result of this research are: first, indicator performance compilation of education local-department has to improve in harmony with Medium Level Development Planning (RPJM) Kebumen Regency and key performance indicator for management education which is released by Domestic Department (Departemen Dalam Negeri). Second, education local-department can develop indicators that show increasing of quality and relevance, impact indicators or other additional indicator to assure efficacy activities and programs. Third, training and technical assistance are needed for compilation workplan base on performance to improve knowledge and skilled of governmental officers at education local-department. This is as one of the way to develop performance indicator on education local-department more specific, unique and have high competitiveness.

Kata kunci: indikator kinerja, dinas pendidikan daerah, pemerintah daerah

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Undang-Undang Dasar 1945 pun telah mengamanatkan kepada negara untuk dapat menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Negara dalam konstitusi adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas pendidikan setiap anak bangsa.

Pemerintah daerah dalam era otonomi daerah pun mendapatkan tantangan yang tidak ringan, ketika urusan pendidikan di tingkat lokal diserahkan kepadanya. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan harus mampu dan mau mengelola pendidikan dengan lebih bertanggung jawab (Indiahono, 2006: 156-158; dan Indiahono, 2009: 36-37). Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu

organisasi (Mahsun, 2005: 25). Indikator kinerja yang jelas berarti juga telah terjadi modernisasi anggaran publik. Sistem penganggaran publik dengan demikian telah bergeser dari paradigma input ke paradigma *output* dan *outcome*. Inilah letak strategis dari indikator kinerja: memberikan kejelasan dan kepastian penggunaan anggaran publik (Greiling, 2005).

Studi yang dilakukan oleh Martin dan Peter berjudul "*Multiple Public Service Performance Indicators: Toward an Integrated Statistical Approach*" mengembangkan model pengukuran kinerja organisasi dengan pendekatan produktivitas. Studinya melaporkan bahwa upaya pengukuran kinerja organisasi perlu mempertimbangkan berbagai sasaran yang akan dicapai organisasi. Dengan cara demikian, akan diperoleh ukuran kinerja organisasi yang lebih kontekstual sekaligus komprehensif (Martin dan Peter, 2005). Studi lainnya yang dilakukan oleh Lee dengan judul "*Measuring the performance of public sec-*

tor organisations: a case study on public schools in Malaysia” melaporkan bahwa ukuran kinerja organisasi publik perlu memasukkan aspek finansial maupun non-finansial. Dengan pendekatan tersebut, organisasi dapat melacak capaian-capaian tujuannya serta dapat mengukur pertumbuhan organisasinya dalam lingkungan yang terus berubah (Lee, 2006).

Salah satu wujud dari pertanggungjawaban urusan pendidikan adalah setiap dinas pendidikan diwajibkan untuk membuat laporan pencapaian kinerja instansinya dalam kurun waktu tertentu. Laporan kinerja ini nantinya dapat dilihat dan dinilai oleh publik, apakah dinas pendidikan telah memadai dalam melakukan usaha peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan di tingkat lokal.

Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan penuh tanggung jawab menyadari hal ini dan menyatakan bahwa pengembangan indikator kinerja merupakan suatu keniscayaan. Sehingga, dengan demikian diperlukan informasi yang akurat mengenai masalah, capaian indikator kinerja masa kini dan indikator kinerja yang sesuai dengan tuntutan masa depan dan tuntutan masyarakat. Begitu pun di sektor pendidikan, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan kemauan dan kemampuannya untuk menyusun indikator kinerja Dinas Pendidikan. Indikator kinerja dinas pendidikan harus dapat menggambarkan komitmen sungguh-sungguh pemerintah daerah untuk mencerdaskan anak bangsa di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian: Bagaimanakah pengembangan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen yang sesuai dengan tuntutan masa depan dan tuntutan masyarakat? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, menganalisisnya dan mengembangkan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen yang selaras dengan tuntutan jaman dan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan dan *focus group discussion* (FGD) untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kinerja organisasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai publikasi dan dokumen

yang relevan baik dari pemerintah Kabupaten Kebumen maupun Pusat. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala bidang, kepala subbidang, dan staf di Dinas Pendidikan Kebumen. Penelitian ini melakukan kajian atas indikator kinerja yang telah ada sebelumnya, kemudian melakukan *review* atas indikator kinerja ada dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan pada indikator kinerja Dinas Pendidikan Kebumen. Rekomendasi perbaikan diarahkan agar Dinas Pendidikan memiliki daya saing dan kemampuan untuk menyelaraskan indikator Dinas Pendidikan dengan tuntutan publik dan relevan dengan kondisi kekinian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pendidikan di Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data tahun 2005-2006 kurang lebih 20% penduduk di Kabupaten Kebumen hanya tamat SD. Meskipun demikian data juga menyebutkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama tahun 2003 hingga tahun 2006 terus meningkat. APS pada tahun 2003-2004 sebesar 85,08%, tahun 2004-2005 sebesar 86,81% dan tahun 2005-2006 sebesar 88,42%. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu kendala penting dari banyaknya penduduk yang tidak melanjutkan sekolah karena anggapan “pendidikan tidak penting” lambat laun mulai berubah. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya angka belum atau tidak sekolah kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Bahkan Angka Partisipasi Kasar Tahun 2005-2006 sudah mencapai 90,06%.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengidentifikasi beberapa masalah pendidikan di Kabupaten Kebumen yang kemudian diupayakan untuk diselesaikan. Beberapa masalah pendidikan dan kebudayaan yang tercantum dalam Renstra Pendidikan tahun 2006-2010 adalah fasilitas pelayanan pendidikan belum tersedia secara merata dan belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Kabupaten Kebumen memiliki 847 SD dan 100 MI, 107 SMP dan 74 MTs, 25 SMA, 17 MA dan 53 SMK. Dengan angka ini maka di setiap desa atau kelurahan rata-rata terdapat 2-3 SD/MI, 6-7 SMP di setiap kecamatan dan 1-2 unit SMA/MA dan 2 SMK di setiap kecamatan. Rata-rata ini meyakinkan bahwa distribusi sekolah untuk jenjang SD dan SMP cukup merata,

sedangkan untuk tingkat SMA masih timpang antara wilayah desa dan wilayah kota. Penambahan jumlah SMA di wilayah pedesaan atau memperbesar kesempatan belajar bagi masyarakat desa di sekolah-sekolah SMA di kota menjadi kebutuhan tersendiri dalam pengembangan sektor pendidikan di Kabupaten Kebumen. Fasilitas pelayanan pendidikan di daerah pedesaan masih terbatas menyebabkan sulitnya anak-anak untuk mengakses layanan pendidikan. Selain hal tersebut, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus (kelainan fisik, emosional, mental dan sosial), dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai. Fasilitas pendidikan ini mencakup sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan (seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran), sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran (seperti halaman, kebun, taman sekolah dan jalan menuju sekolah) (Mulyasa, 2007: 49).

Kualitas pendidikan masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal ini terutama disebabkan: 1) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, 2) kesejahteraan pendidik yang masih

rendah, 3) fasilitas belajar belum mencukupi, dan 4) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai. Data pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen tahun 2006 menunjukkan bahwa rasio guru dengan murid untuk SD adalah 24,20 dan MI adalah 38,95, untuk SMP dan MTs masing-masing 18,40 dan 12,40, sedangkan untuk SMA adalah 16,98, SMK adalah 13,59 dan SMK adalah 17,20 (Lihat Tabel 1).

Selain hal tersebut, secara kualitas pendidik di Kabupaten Kebumen masih kurang, ini dibuktikan dengan belum terpenuhinya kualifikasi pendidikan para pendidik.

Pada tahun 2006 sekitar 45,45 persen ruang kelas SD dan sekitar 12,04 persen ruang kelas SMP mengalami rusak ringan dan rusak berat. Hal ini berpengaruh pada kelayakan dan kenyamanan proses belajar mengajar dan motivasi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu masalah yang diidentifikasi dalam Renstra Pendidikan Kabupaten Kebumen tahun 2006-2010 adalah masih belum jelasnya pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk dalam penyediaan anggaran, dan belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dengan acuan dari pemerintah pusat dan propinsi.

Tabel 1. Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Kebumen Tahun 2006

No	Tingkat Pendidikan	Rasio Gu
1	SD	24
2	MI	38
3	SMP	18
4	MTs	12
5	SMA	16
6	MA	13
7	SMK	17

Sumber: Diolah dari Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen 2006-2010

Tabel 2. Proporsi Pendidikan Guru Tahun 2006

Keterangan
Proporsi guru SD yang berpendidikan Diploma 2 ke atas
Proporsi guru SMP yang berpendidikan S-1 ke atas
Proporsi guru SMA yang berpendidikan S-1 ke atas
Proporsi guru SMK yang berpendidikan S-1 ke atas

Sumber: Diolah dari Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen 2006-2010

Selain beberapa hal di atas masalah yang terkait dengan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kebumen adalah anggaran pembangunan pendidikan yang belum tersedia secara memadai; bidang olah raga dan kebudayaan yang belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat; perkembangan masyarakat yang sangat dinamis sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku; serta krisis jati diri (identitas nasional) yang diiringi dengan runtuhnya nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan keramahan sosial yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia, makin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme.

Guru yang berkualitas menjadi pendidik yang dapat memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Menurut Mulyasa guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan, dengan memosisikan diri sebagai berikut: (1) Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya; (2) Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi para peserta didik; (3) Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan dan bakatnya; (4) Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahannya; (5) Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab; (6) Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan (bersilaturahmi) dengan orang lain secara wajar; (7) Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antarapartesita didik, orang lain dan lingkungannya; (8) mengembangkan kreativitas; (9) Menjadi pembantu ketika diperlukan (Mulyasa, 2005: 36).

Hasil penelitian Toyamah dan Usman dari SME-RU menunjukkan bahwa hambatan di bidang pendidikan yang dihadapi di daerah sejak sebelum otonomi daerah hingga kini belum banyak bergeser. Persoalannya masih di sekitar permasalahan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak lengkap, jumlah dan mutu tenaga yang kurang dengan ketersebaran yang tidak merata (Toyamah dan Usman, 2004: iv). Terkait dengan usaha meningkatkan mutu pendidikan bagi keluarga miskin, ada contoh menarik yang dilakukan oleh Presiden Hugo Chavez dengan menggerakkan partisipasi Lingkaran Bolivarian dalam *Plan Bolivar*

2000. Plan itu memperbolehkan Chavez memobilisasi tentara Venezuela di area-area miskin dengan maksud untuk memberikan pelayanan kesehatan, memberikan makanan, membangun perlengkapan umum, peningkatan mutu sekolah dan mengorganisasikan logistik bagi orang yang paling membutuhkan, misalnya orang miskin di daerah-daerah yang sangat kumuh di perkotaan (Soyomukti, 2007: 177). Selain melakukan hal tersebut, keberhasilan Chavez dalam pendidikan terlihat sebagai berikut: "...didirikannya 3000 sekolah-sekolah gratis baru, memasukkan 1,5 juta rakyat ke sekolah-sekolah gratis-program ini adalah yang pertama kali dalam 102 tahun. Menetapkan sistem pendidikan tinggi gratis-mendirikan Universitas Simon Bolivar, untuk mayoritas rakyat miskin yang selama ini menganggap pendidikan tinggi adalah barang mewah (rakyat miskin mendapat buku teks pelajaran gratis, transportasi ke universitas gratis, makanan gratis). Mahasiswa dan staf universitas juga bekerja bersama secara demokratis membuat kurikulum (*Mission Robinson I, Mission Robinson II Mission Ribas dan Sucre*). Misi Robinson berhasil membebaskan Venezuela dari buta huruf di tahun 2005 (data UNICEF) dan meluluskan 900.000 orang yang *drop out* sekolah dasar di tahun 2004. Mission Ribas menyekolahkan orang-orang yang *drop out* SLTA, dan Sucre memberi beasiswa untuk orang miskin masuk ke perguruan tinggi. Secara simultan juga membangun 200 Universitas Simon Bolivar di kota-kota..." (Soyomukti, 2007: 123-124)

Pendidik dengan demikian harus senantiasa di-*support* untuk terus berkembang menjadi tenaga pendidik yang handal dan profesional, dan salah satu caranya adalah dengan cara pendidikan dan pelatihan. Kajian Harris dan Sass (2007) menunjukkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan produktifitas. Produktifitas inilah yang dapat dilihat sebagai terjadinya peningkatan kualitas guru dan perkembangan peserta didik.

Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen berusaha mencari solusi dari masalah-masalah di atas, dan berusaha dapat mencapai hal-hal sebagai berikut: (1) Pembangunan pendidikan ke depan secara sistematis diarahkan pada pemerataan dan perluasan pendidikan, peningkatan mutu dan keunggulan serta efisiensi

pendidikan yang dikembangkan melalui berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan, diantaranya: a) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada sistem di semua jenjang pendidikan sesuai dengan moto: Kebumen Beriman, b) Meningkatkan penerapan manajemen mandiri pendidikan berbasis sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas pada satuan pendidikan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki, c) Meningkatkan angka partisipasi pada semua jenjang pendidikan (APK dan APM), d) Meningkatkan kualitas setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan dengan menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sarana pendidikan, ketegaan dan pendanaan, e) Penataan program keahlian pendidikan kejuruan dalam rangka mewujudkan sistem pendidikan persiapan kerja yang berorientasi pada kebutuhan pasar, f) Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan, g) Perwujudan lingkungan yang berdisiplin dan bermakna agar semakin kondusif setiap satuan pendidikan terbebas dari pengaruh penyalahgunaan obat-obat terlarang, kekerasan dan penyimpangan perilaku, dan h) Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan;

(2) Pembangunan generasi muda keolahragaan dan seni yang diinginkan antara lain: a) Pembangunan kepemudaan diarahkan kepada kegiatan sosial budaya yang positif dan kegiatan ekonomi produktif, b) Pengembangan aspek mental dan moral pembangunan para pemuda melalui sistem pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah khususnya melalui pendidikan agama, pendidikan jasmani dan olahraga, pendidikan budi pekerti dan kewarganegaraan serta pendidikan keterampilan pemuda, c) Pengembangan pemuda melalui kegiatan ekonomi produktif kegiatan usaha kecil, khususnya ekonomi pedesaan, d) Peningkatan wawasan para pemuda dalam rangka mencegah timbulnya ancaman disintegrasi bangsa, serta memupuk saling kerja sama, e) Peningkatan keterampilan pemuda dalam menciptakan daya saing, f) Perluasan olah raga masyarakat yang bertumpu pada kemampuan swakelola dan swadana, g) Pembinaan olahraga prestasi dengan meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana yang memadai, h) Penerapan sistem manajemen olahraga yang lebih efisien, dan i) Memberikan penghargaan secara nyata kepada sistem dan pembina olah raga kesenian yang berprestasi.

Antara Strategi dalam Renstra Pendidikan dengan Strategi RPJM Kabupaten Kebumen

Masalah pendidikan di Kabupaten Kebumen telah diidentifikasi dengan baik, baik yang dicantumkan dalam RPJM maupun yang dicantumkan dalam rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun demikian ternyata dalam strategi yang tercantum dalam RPJM dan Renstra Pendidikan terdapat perbedaan. Padahal Renstra Pendidikan sebagai dokumen yang mengacu RPJM seharusnya merupakan dokumen yang secara konsisten menjabarkan RPJM Kabupaten Kebumen. Jika dianalisis dan disinkronkan, maka akan didapati hasil seperti pada Tabel 3.

Renstra pendidikan yang kurang sinkron dengan RPJM Kabupaten berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* diakui karena memang terbitnya Renstra Pendidikan tahun 2006-2010 berhampiran atau bersamaan dengan kelahiran RPJM Kabupaten. Sehingga, jika memang terdapat sedikit perbedaan memang suatu hal yang mungkin terjadi karena pembahasannya hampir bersamaan. Di masa yang akan datang, semoga saja penyusunan rencana strategis harus benar-benar merujuk pada RPJM Kabupaten Kebumen, sehingga strategi untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang ada merupakan gerakan terpadu antara Dinas Pendidikan dengan Pemerintah Kabupaten. Apalagi, dalam strategi RPJM telah dicantumkan hal yang strategis yang dapat menyuplai kinerja Dinas Pendidikan seperti: (a) Meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada satuan pendidikan dalam mengelola pendidikan secara sehat, bertanggung jawab dan akuntabel yang diikuti dengan sistem kontrol dan jaminan kualitas pendidikan serta sistem penilaian kinerja sampai dengan satuan pendidikan; dan (b) Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabel dan peningkatan anggaran pendidikan secara bertahap hingga mencapai 20 persen untuk melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan menjadi arena yang strategis untuk memerangi kemiskinan. Menurut Sharp, penyebab dari kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi adalah, *pertama*, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Pen-

Tabel 3. Analisis Strategi RPJM dan Renstra Pendidikan

Strategi RPJM Kabupaten Kebumen (lama)	Strate
1. Meningkatkan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	1. I F
2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama sebagai dampak keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas.	I C I V r C
3. Memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan ataupun masyarakat penyandang cacat.	
4. Meningkatkan penyediaan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan ataupun pendidikan non formal yang bermutu	2. I
5. Meningkatkan pendidikan non formal yang merata dan bermutu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta akasara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh pengetahuan, kecakapan/ keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidupnya.	
6. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan dan tenaga pendidik	3. I F
7. Menyempurnakan manajemen pendidikan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan	4. I F F F
8. Meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan pemberian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada satuan pendidikan dalam	5. I C

Sumber: Data Primer Diolah, 2008

duduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. *Keempat*, teori lingkaran se-

tan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), yaitu adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas (Sharp dalam Kuncoro, 2003: 131). Sehingga tidaklah mengherankan jika di negara maju ang-

garan pendidikan hampir bisa dipastikan terus naik setiap tahun. Pendidikan diyakini sebagai alat untuk menciptakan modal manusia yang handal. Pembentukan modal manusia adalah “proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembentukan modal manusia karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif” (Harbison dalam Jhingan. 1996: 521). Hal ini menjadi penting karena studi yang dilakukan oleh beberapa ahli ekonomi seperti Schultz, Harbison, Dension, Kendrick, Moses Abramovits, Becker, Mary Bowman dan Kuznets menyatakan bahwa salah satu dari beberapa faktor penting yang menyebabkan perekonomian Amerika maju dengan pesat adalah adanya pembiayaan pendidikan yang relatif selalu meningkat. Pertumbuhan persediaan modal nyata pada kondisi tertentu tergantung pada pembentukan modal manusia (Jhingan. 1996: 522). Untuk kasus di Indonesia, Studi Brata dapat mewakilinya, yaitu: “Dari hasil estimasi dengan menggabungkan data tahun 1996, 1999, dan 2002 diperoleh bukti bahwa investasi sektor publik untuk bidang sosial membawa manfaat bagi pembangunan manusia dan kesejahteraan penduduk. Investasi bidang sosial tersebut menghasilkan manfaat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia yang berhasil juga ditemukan membawa manfaat pada berkurangnya tingkat kemiskinan” (Brata. 2005: 15).

Indikator Kinerja Kunci dalam Rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap LPPD Tahun 2007-Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan untuk Pemerintah Daerah

Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menentukan Indikator Kinerja Kunci dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap capaian urusan wajib dan urusan pilihan untuk pemerintah daerah salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu urusan wajib oleh Kementerian Dalam Negeri telah ditentukan indikator kinerja kuncinya untuk menilai berhasil atau tidaknya sebuah kabupaten/kota menyelenggarakan urusan wajib tersebut. Instrumen pengun-

kur indikator kinerja kunci dalam urusan pendidikan dapat dilihat dalam Tabel 4.

Selain untuk kebutuhan pemerintah pusat, evaluasi ini juga bermanfaat untuk menjadi ukuran kinerja dinas pendidikan di tingkat lokal. Indikator ini dapat dijadikan barometer keberhasilan atau kegagalan kinerja dinas pendidikan. Instrumen indikator kinerja kunci yang telah ditentukan dapat dikembangkan dengan menentukan besaran target capaian yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan dalam suatu kurun waktu tertentu, misalnya untuk Pendidikan Anak Usia Dini untuk tahun 2009 Dinas Pendidikan menargetkan 75 % anak seusia 4- 6 tahun masuk dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Berikut adalah CONTOH SIMULASI yang dapat dikembangkan (Tabel 5).

Dengan membuat target atau *baseline* dari indikator kinerja kunci, maka diharapkan Dinas Pendidikan dapat mudah menyatakan keberhasilan atau kurangberhasilan program yang terkait dengan pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian Kajian Pengembangan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten ini telah mengamati beberapa kesimpulan penting, yaitu:

Dinas Pendidikan menyadari bahwa Kabupaten Kebumen telah paripurna dalam Wajar Dikdas 9 tahun, sehingga sekarang Dinas Pendidikan telah menyusun program untuk menyongsong Wajar 12 tahun. Pada masa yang akan datang penyusunan indikator kinerja Dinas Pendidikan pun harus dikembangkan selaras dengan program Wajar 12 tahun dan upaya meningkatkan mutu dan relevansi. Penyusunan indikator kinerja Dinas Pendidikan harus dikembangkan selaras dengan RPJM Kabupaten Kebumen dan Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan Urusan wajib Pendidikan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Dinas Pendidikan dapat mengembangkan indikator yang menunjukkan peningkatan mutu dan relevansi, indikator dampak atau indikator tambahan lainnya, untuk meyakinkan keberhasilan suatu program dan kegiatan. Pelatihan dan pendampingan penyusunan program kerja berbasis kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat pemerintah pada Dinas Pendidikan, sebagai salah satu cara untuk mengembangkan indikator kinerja Dinas Pendidikan yang lebih spesifik, khas dan memiliki daya saing tinggi.

Tabel 4. Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Pendidikan

Tabel 5. Simulasi Pengembangan Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Pendidikan

No	Urusan	Indikator	Rumus
		Pendidikan Anak	Jumlah siswa pada jenjang TK/ RA/ Penitipan anak X 1
Pendidikan	an	Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah anak usia 4-6 tahun
		Penduduk yang Dini berusia >15 tahun	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis
		Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas melek huruf
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas melek huruf
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/ MA/ Paket C	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas melek huruf
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas melek huruf
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas melek huruf
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/ SMK/ MA/ Paket C	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas melek huruf
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas melek huruf
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas melek huruf
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/ SMK/ MA/ Paket C	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas melek huruf

Sumber: Data Diolah, 2008

DAFTAR RUJUKAN

- Anonim. 2006. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kebumen (2006-2010)*.
- _____. 2006. *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan (2006-2010) Kabupaten Kebumen*.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2005. Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan. Makalah untuk "Making Services Works for the Poor Research Competition", World Bank Office, Jakarta. Lembaga Penelitian - Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Februari 2005.
- Greiling, Dorothea. 2005. "Performance Measurement in the Public Sector." *International Journal of Productivity and Performance Management* Vol. 54, No. 7.
- Harris, Douglas N. dan Tim R. Sass. 2007. *Teacher Training, Teacher Quality, and Student Achievement*. the National Center for the Analysis of Longitudinal Data in Education Research (CALDER) - the Urban Institute
- Indiahono, Dwiyanto. 2006. *Reformasi "Birokrasi Amplop": Mungkinkah?*. Gava Media: Yogyakarta.
- _____. 2009. *Public Disobedience: Telaah Penolakan Publik terhadap Kebijakan Pemerintah*. Gava Media: Yogyakarta.
- Jhingan, ML. 1996-cetakan keenam. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003-cetakan ketiga. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
- Lee, Nagarajah. 2006. *Measuring the performance of public sector organisations: a case study on public schools in Malaysia. Measuring Business Excellence*, VOL. 10 NO. 4 2006, pp. 50-64.
- Mahsun, Mohamad. 2005. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-UGM: Yogyakarta.
- Martin, Stephen dan Peter C. Smith. 2005. *Multiple Public Service Performance Indicators: Toward an Integrated Statistical Approach*. *Journal of Public Administration Research and Theory* 15:599-613.
- Mulyasa, E. 2005-cetakan ketiga. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- _____. 2007 cetakan kesebelas. *Manajemen Berbasis Sekolah*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Soyomukti, Nurani. 2007. *Hugo Chavez: Revolusi Bolivarian dan Politik Radikal*. Resist Book: Yogyakarta.
- Toyamah, Nina dan Syaikhu Usman. 2004. *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*. Lembaga Penelitian SMERU: Jakarta.